

**PEMANFAATAN PETA TEMATIK PERTANAHAN DAN RUANG UNTUK  
MENDUKUNG PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN GRESIK PERKOTAAN**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh:  
ELISA DWI SEPTIANIKA  
NIT. 19283247**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2023**

## **ABSTRACT**

*Sustainable development that considers the environment has become a primary focus within the SDGs. One of the goals of sustainable development in Indonesia is achieved, in part, through spatial planning, specifically through the implementation of Detailed Spatial Planning (RDTR). RDTR also brings positive direction to investments in Indonesia following the enactment of the Omnibus Law on Job Creation (UUCK). However, in its implementation, there are challenges related to the limitation of detailed-scale data (1:5,000). On the other hand, the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency (Kementerian ATR/BPN) possesses geospatial information referred to as Thematic Maps of Land and Space (PTPR). This study aims to explore the strategies for utilizing Thematic Maps of Land and Space data to support the formulation of RDTR.*

*The research methodology employed is a sequential exploratory mixed-methods approach with data simulation. Informant selection techniques are conducted through Purposive Sampling and Snowball Sampling. Data collection methods encompass interviews, observations, and document analysis.*

*The research findings indicate that Thematic Maps of Land and Space can be utilized to support the formulation of RDTR and play a pivotal role in its development, particularly regarding land use, utilization, and ownership. Several strategies for utilizing Thematic Maps of Land and Space data to support RDTR formulation include: firstly, integrating PTPR data with land parcel boundaries, utilizing high-resolution satellite imagery data, and supplementing with environmental assessments to yield more accurate RDTR outputs that consider environmental aspects. Secondly, the utilization of PTPR supports the alignment of property rights and spatial function policies. Thirdly, participatory mapping within PTPR provides an opportunity to extract relevant information from the area, leading to the creation of higher-quality spatial plans that align with shared needs.*

**Keywords:** Land and Spatial Thematic Map, RDTR, Parcel.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>INTISARI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>5</b>
A. Kajian Literatur .....	5
B. Kerangka Teoretis .....	13
C. Kerangka Pemikiran .....	18
D. Pertanyaan Penelitian .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>20</b>
A. Format Penelitian .....	20
B. Lokasi penelitian .....	20
C. Informan dan teknik pengambilan informan. ....	21
D. Definisi Operasional Konsep .....	21

E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	22
F. Analisis Data .....	24
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Letak Geografis dan Luas Wilayah.....	26
B. Penggunaan Tanah .....	29
C. Penataan Ruang Wilayah .....	31
<b>BAB V PEMANFAATAN PETA TEMATIK DALAM PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG.....</b>	<b>34</b>
A. Atribut Data PTPR Untuk Penyusunan RDTR .....	34
1. Peta Tematik Pertanahan dan Ruang Kabupaten Gresik.....	34
2. Informasi Pertanahan Untuk Penyusunan RDTR.....	37
B. Strategi Pemanfaatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang untuk penyusunan RDTR .....	40
1. Penyusunan RDTR memanfaatkan PTPR .....	40
2. Hasil Penyusunan RDTR dengan pemanfaatan PTPR .....	42
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan.....	53
B. Rekomendasi .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>59</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Sustainable Development Goals (SDGs)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan gerakan kolaboratif global dengan tujuan mengatasi kemiskinan, menjaga keberlanjutan planet bumi, dan menjamin kehidupan yang aman dan layak bagi semua individu hingga tahun 2030 (UNDP, t.t.). Untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, pemerintah telah merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Kementerian PPN/Bappenas, 2020). Dalam (RPJMN) Tahun 2020-2024, penataan ruang di Indonesia menjadi hal yang sangat penting sebagai upaya percepatan pembangunan, terutama terkait penyediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RDTR memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan investasi di suatu wilayah. Dengan kata lain, RDTR dapat membantu mempercepat investasi di Indonesia (Direktorat Jenderal Tata Ruang, 2023).

Pasca disahkannya Undang – Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya sebagaimana disahkan dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, proses perizinan diubah menjadi izin berbasis risiko dengan sistem perizinan yang sederhana sehingga mempermudah kegiatan investasi. Sistem yang dikenal dengan nama Perizinan Berbasis Risiko, dapat diakses melalui platform daring yang disebut *Online Single Submission Risk Approach (OSS-RBA)* (Karina, 2022).

Ketersediaan RDTR mempermudah pengajuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pada sistem *OSS RBA*. Selain mempermudah pengajuan KKPR, RDTR juga sebagai instrumen kontrol dan pengendalian tata ruang (Pirade, 2022). Data terbaru yang diperoleh dari Menteri Investasi/ Kepala BKPM dalam Rapat Kerja Nasional, jumlah Rencana Detail Tata

Ruang yang terintegrasi dengan *Online Single Submission (OSS)* saat ini hanya sebesar 140 RDTR dari total target 2000 RDTR pada tahun 2024. Sedangkan RDTR yang belum disusun dan/atau diintegrasikan dengan OSS berjumlah 1.882 RDTR.

Menurut Sutaryono (2019) terdapat beberapa hambatan yang dihadapi terkait dengan kemajuan yang lambat dari progres RDTR-PZ sampai saat ini adalah (1) Minimnya atau bahkan ketidakadaan *political will* dan komitmen pimpinan daerah, dalam mewujudkan RDTR; (2) Keterbatasan data dan informasi spasial yang tersedia dengan tingkat detail (1:5000) yang rendah; (3) Keterbatasan sumberdaya manusia, baik dalam hal kualitas maupun jumlahnya; (4) Dana yang terbatas, baik untuk keperluan kajian, penyusunan naskah akademik, maupun proses legislasi (5) Adanya konflik kepentingan. Hal tersebut menjadikan proses penyediaan RDTR menjadi terhambat.

Idealnya untuk penyusunan RDTR diperlukan pada skala 1:5000, tetapi peta tematik yang tersedia dengan skala terbesar 1:25000 untuk wilayah seluas Kabupaten. Penyediaan peta tematik dengan skala 1:5000 dimungkinkan tidak menjadi sebuah prioritas bagi instansi terkait sehingga dapat menyebabkan kesenjangan prioritas yang mengakibatkan ketidaktersediaan peta yang diperlukan untuk merencanakan kegiatan RDTR di lokasi studi (Santoso et al., 2020).

Disisi lain, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengupayakan pembuatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR) sebagai upaya untuk menciptakan tata kelola pertanahan dan ruang yang baik dan berkelanjutan. PTPR merupakan pemetaan mengidentifikasi batas fisik bidang tanah, menginventarisasi data atribut penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) serta informasi tematik lainnya melalui sensus dan menjadi *basic layer* berbagai informasi geospasial tematik Kementerian ATR/BPN lainnya (Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik, 2020).

Kabupaten Gresik merupakan wilayah dengan perkembangan investasinya cukup tinggi. Total investasi yang masuk sebesar 31,6 Triliun rupiah menjadikan Kabupaten Gresik memperoleh penghargaan sebagai

Kabupaten Terbaik Bidang Investasi di Jawa Timur. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya investasi yang masuk ke wilayah Gresik. Menurut Suprihartono (2019) dalam radar surabaya, penerapan OSS belum tersinkron antara perizinan pusat dengan daerah dan beberapa wilayah di Gresik belum memiliki RDTR sehingga investor menghadapi kesulitan untuk masuk dan berinvestasi di wilayah tersebut.

Berdasarkan data aplikasi PROTARU (Progress Penyelesaian Tata Ruang) per Maret 2023, total RDTR di Kabupaten Gresik berjumlah 8 RDTR. Namun, hanya terdapat 1 RDTR yang sudah Perda, yaitu RDTR WP Manyar dan Bungah, sisanya masih dalam tahap penyusunan. Status progres WP Gresik Perkotaan saat ini adalah persetujuan substansi dengan beberapa catatan keterangan. Salah satu catatan keterangan adalah basis data peta yang perlu penyesuaian kembali.

Pada Tahun 2022, di Kabupaten Gresik dilaksanakan pembuatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang sebagai *pilot project* nasional dalam rangka mewujudkan Gresik Kabupaten Lengkap. Menurut Triwibawa (2022) pembuatan PTPR dengan capaian target rencana pemetaan tematik dari 150 ribu bidang berhasil ditingkatkan menjadi kurang lebih 177 ribu bidang dalam waktu yang relatif singkat berkat kerjasama yang baik antara Kementerian ATR/BPN bersama Pemerintah Kabupaten Gresik. Dengan keberadaan data PTPR, diharapkan bahwa proses perencanaan RDTR di wilayah-wilayah strategis Kabupaten Gresik akan menjadi lebih mudah. Menurut Mardiyono (2022) PTPR berisi informasi berbasis bidang yang dapat memberikan manfaat dalam pengambilan kebijakan, terutama sebagai komponen penyusunan RDTR dan sebagai alat untuk mengukur kepatuhan terhadap RDTR jika dilakukan secara berkala. Selain itu, diharapkan bahwa PTPR dapat mendukung implementasi kebijakan One Map Policy di Kabupaten Gresik. Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Pemanfaatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang Untuk Mendukung Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Gresik Perkotaan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja atribut pada data PTPR yang dapat dimanfaatkan untuk penyusunan RDTR?
2. Bagaimana strategi pemanfaatan data PTPR untuk penyusunan RDTR?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh calon peneliti adalah:

- a. Mengetahui atribut data PTPR yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyusunan RDTR.
- b. Mengetahui strategi pemanfaatan data PTPR untuk mendukung penyusunan RDTR.

### 2. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat akademisi dari penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan mengenai pemanfaatan PTPR untuk mendukung penyusunan RDTR.
- b. Manfaat praktisi dari penelitian ini diharapkan dapat memberi rekomendasi dan saran dalam pengembangan dan pemanfaatan PTPR untuk mendukung penyusunan RDTR.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Atribut data PTPR untuk mendukung penyusunan RDTR meliputi pemanfaatan atribut yang mendetail mengenai penggunaan, penguasaan, pemanfaatan, dan pemilikan tanah. PTPR berbasis bidang tanah menjadi kunci penting dalam mengintegrasikan penataan ruang dengan aspek pertanahan untuk pembangunan berkelanjutan dan terintegrasi. Data PTPR berbasis bidang tanah yang terintegrasi dengan KKP memiliki tingkat ketelitian geometri mencapai 0,3-2,25 meter, yang lebih tinggi daripada prasyarat data dasar RDTR. Data PTPR juga mencakup informasi penting tentang penggunaan, penguasaan, pemanfaatan, dan pemilikan tanah, yang menjadi landasan kuat dalam menyusun RDTR yang efektif dan akurat. Oleh karena itu, PTPR dapat digunakan untuk mendukung penyusunan RDTR.
2. Memanfaatkan data PTPR sebagai pendukung penyusunan RDTR dapat ditingkatkan melalui beberapa strategi. Pertama, integrasi data PTPR dengan batas-batas bidang tanah dan penggunaan data citra satelit resolusi tinggi dapat menghasilkan output RDTR yang lebih akurat dan mempertimbangkan aspek lingkungan. Kedua, penggunaan PTPR mendukung penyelarasan *property right* dan kebijakan fungsi ruang, mengurangi konflik spasial serta hambatan perizinan, sehingga mendorong percepatan investasi. Terakhir, melalui pemetaan partisipatif yang melibatkan masyarakat, PTPR memberikan kesempatan untuk menggali informasi yang relevan dari kawasan tersebut, menghasilkan rencana tata ruang yang lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan bersama. Dengan memanfaatkan PTPR secara baik dan tepat, penyusunan RDTR dapat menjadi lebih terinformasi, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik serta potensi wilayah yang ada. Berdasarkan hasil simulasi yang ada, dibuatkan rekomendasi peta RDTR WP Gresik Perkotaan berbasis bidang pemanfaatan data PTPR.

## **B. Rekomendasi**

1. Data PTPR dipergunakan untuk mendukung penyusunan RDTR pada 2 kecamatan lokus kegiatan PTPR lainnya, yaitu Kecamatan Wringinanom dan Kecamatan Kedamean.
2. Data peta tematik pertanahan dan ruang dalam memberikan wawasan tentang kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat. Informasi ini menjadi dasar bagi perencana untuk membuat keputusan yang tepat dalam menentukan arah pembangunan wilayah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, perencanaan pembangunan wilayah dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggunsuri, U., & Zahara, Z. (2023). Transition of Online Single Submission (Oss 1.1 To Risk-Based Approach) To Increase Investment in West Sumatera. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 8(2), 253.
- Arnowo, H. (2020). Tata Kelola Peta Di Dalam Kkp (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) Menuju Terwujudnya Sistem Peta Tunggal. *Jurnal Pertanahan*, 10(1), 15–23.
- Arnowo, H. (2021). Integrasi Peta Tematik Pertanahan Berbasis Kebijakan Satu Peta (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat). *Geo Spatial Proceeding*, 1–23.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. (2022a). *Kabupaten Gresik Dalam Angka 2022*. BPS Kabupaten Gresik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. (2022b). *Kecamatan Gresik Dalam Angka 2022*. BPS Kabupaten Gresik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik. (2022c). *Kecamatan Kebomas Dalam Angka 2022*.
- Banks, J. (Ed.). (1998). *Handbook Of Simulation Principles, Methodology, Advances, Applications, And Practice*. John Wiley & Sons.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Penerbit Pustaka Belajar.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. (2021). *Laporan Fakta Analisa RDTR BWP Gresik Perkotaan*. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. (2022). *Buku Materi Teknis RDTR WP Gresik Perkotaan 2022*. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- Direktorat Jenderal Tata Ruang. (2023). *RDTR Menjadi Kunci Dalam Percepatan Investasi*. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Diakses: 25 April 2023 dari <https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/4425>.
- Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik. (2020). *Petunjuk Teknis Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang Tahun 2020*. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Hakim, L. (2023). Telaah Hukum Terhadap Perizinan Dalam Proses Investasi Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Dialektika Hukum*, 5(1), 1–13.

- Karina, A. D. (2022). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam Memberikan Kemudahan Untuk Berinvestasi di Indonesia Implementation of the Job Creation Law in Providing Easy of Investment in Indonesia. *Smart Law Journal*, 2022(2), 86–96.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). *Sekilas SDGs*. Sekretariat Nasional SDGS. Diakses: 16 Agustus 2023 dari <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Ringkasan Eksekutif Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mardiyono, Y. (2022, September 22). *Siapkan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Spasial dengan Pembuatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang*. Siaran Pers Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Diakses: 27 April 2023 dari <https://www.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/4007/siapkan-kebijakan-pembangunan-berkelanjutan-berbasis-spasial-dengan-pembuatan-peta-tematik-pertanahan-dan-ruang>.
- Nuryanti, D. S. (2020). Review Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Studi Kasus Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-20. *Prosiding Seminar Nasional, Semarang 2 Desember 2020 “Pembangunan Hijau dan Perizinan: Diplomasi, kesiapan perangkat dan pola standarisasi,”* 119–128.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Permatasari Lababa, D. (2021). Kesesuaian Penggunaan Tanah Berbasis Bidang Tanah Terhadap Kajian Rencana Detail Tata Ruang. *Tunas Agraria*, 4(2), 213–228.

Pirade, A. E. (2022, September 28). *KSP Dorong Percepatan Penyusunan RDTR Kemudahan Usaha – Kantor Staf Presiden*. Diakses 27 April 2023 dari <https://www.ksp.go.id/ksp-dorong-percepatan-penyusunan-rdtr-kemudahan-usaha.html>.

Prabowo, H. L. (2019). Study of parcels-based Land Use Planning in Urban areas dan Rural Areas (Case Study of Mantrijeron Sub-district, Yogyakarta City and Bambanglipuro Sub-district, Bantul Regency). *JGISE: Journal of Geospatial Information Science and Engineering*, 2(1), 171–184.

Pratama dkk. (2015). *Menata Kota Melalui Rencana Detail Tata Ruang* (M. Bendatu (Ed.)). Penerbit ANDI.

Pribadi, C. B., Hariyanto, T., & Puspita, A. I. (2017). Pembuatan Peta Dasar Skala 1:5000 Menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi (Csrt) Pleiades 1-a Sebagai Acuan Pembuatan Peta Rdtr Pada Bagian Wilayah Perkotaan (Bwp) Lumajang, Kabupaten Lumajang. *Geoid*, 12(2), 153–157.

Puspitasari, S., & Sutaryono. (2017). *Integrasi Agraria Pertanahan dan Tata Ruang (Menyatukan Status Tanah dan Tata Ruang)*. STPN Press.

Rahadian, A. (2016). Strategi Pembangunan Berkelanjutan. *Prosiding Seminar STIAMI*, III(01), 46–56.

Santoso, E. B., Iswi, A., & Yanuasmara, I. (2020). Innovation, Problem, and Challenges in Preparing Rdtr for Oss: Case in Preparing Rdtr in Eeatern Sendawar, West Kutai Regency, East Kalimantan Province. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 46(1), 230–241.

Silviana, A. (2019). Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Mencegah Konflik di Bidang Administrasi Pertanahan. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 195–205.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo (Ed.)). Penerbit Alfabeta.

- Suprihartono, T. A. (2019). *Investasi Gresik Terganjil Sistem Perizinan Online Single Submission*. Diakses 29 April 2023 dari <https://radarsurabaya.jawapos.com/ekonomi/14/09/2019/investasi-gresik-terganjal-sistem-perizinan-online-single-submission/>.
- Suprojo, B., Rosyidi, F. A., & Pinuji, S. (2021). Pemetaan Tematik Dan Tata Ruang Kepulauan Lengkap Berbasis Sistem Informasi Geografis Agar Tercapainya Manajemen Pertanahan. *Elipsoida: Jurnal Geodesi dan Geomatika*, 4(2), 73–84.
- Sutaryono (2019) Percepatan RDTR, Manajemen Pertanahan. Diakses 5 Januari 2023 dari <http://manajemenpertanahan.blogspot.com/2019/>
- Sutaryono, & Dewi, A. R. (2020). Pemanfaatan Neraca Penatagunaan Tanah Untuk Percepatan Penyusunan Rdtr-Pz. *Jurnal Pertanahan*, 10(1), 25–38.
- Triwibawa, G. (2022, September 22). *Siapkan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Spasial dengan Pembuatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang*. Siaran Pers Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Diakses 27 Maret 2023 dari <https://www.atrbpn.go.id/siaran-pers/detail/4007/siapkan-kebijakan-pembangunan-berkelanjutan-berbasis-spasial-dengan-pembuatan-peta-tematik-pertanahan-dan-ruang>.
- UNDP. (n.d.). *Sustainable Development Goals*. Diakses 25 Maret 2023, dari <https://www.undp.org/sustainable-development-goals>
- Widiyantoro, S., & Sutaryono. (2020). Pemanfaatan Data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk Penyusunan Produk Penataan Ruang Berbasis Bidang Tanah (Studi Kasus di Desa Alo, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango). *Seminar Nasional Geomatika*, 2007(1), 471.
- Windywati, R. (2019). Mewujudkan Pemanfaatan Ruang Yang Berkualitas Dengan Percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). *Buletin Penataan Ruang: Percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)*, 26.
- Yudhatama, D., Arifin, S., & Dewi, C. (2020). *Kajian Potensi Tematik Data Satelit Resolusi Tinggi Untuk Mendukung Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)*. June.
- Yunus, H. S. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Pustaka Belajar.